



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/353 TAHUN 2026
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PEMALANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota yang mengatur mengenai perubahan dan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Pematang Nomor B/900.1/219/BPKPAD/2026 tanggal 15 September 2026 Hal Permohonan Evaluasi Raperda Perubahan APBD Kabupaten Pematang TA. 2026 dan Raperbup Penjabarannya.
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2026 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 17 September 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bupati Pemalang Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Pemalang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Pemalang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Bupati Pemalang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Pemalang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati Pemalang;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;

8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/353 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN
2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PEMALANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2026

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dimaksud dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- A. Kepentingan umum;
- B. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Pasal 111 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. KEBIJAKAN UMUM

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati Pemalang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel 2.1, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	B/900.1.1/72/BPK PAD/2026	5 Agustus 2026	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
2.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang.	B/900.1.1/71/BPK PAD/2026	6 Agustus 2026	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
3.	Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Pemalang	900.1.1/1329 900.1.1/1408	11 Agustus 2026	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4.	Kesepakatan Perubahan Rancangan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD	900.1.1/1330 900.1.1/1409	11 Agustus 2026	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
	Kabupaten Pemalang			
5.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Pemalang	B/900.1/181/BPKP AD/2026	18 Agustus 2026	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6.	Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Pemalang dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD	903/1615 900.1.1.4/1649	14 September 2026	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir)
7.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi	B/900.1/219/BPKP AD/2026	15 September 2026 disampaikan ke Provinsi tanggal 16 September 2026	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah seluruhnya berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud Bab III.A.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir IV.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan perubahan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam perubahan APBD dapat diselesaikan

pada tahun anggaran berjalan, Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam penyusunan perubahan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjamin keselarasan antara perencanaan dan penganggaran serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 harus memedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA/PPAS Tahun 2026 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Jumlah dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagaimana Tabel. 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

No	Uraian	Perubahan RKPD Tahun 2026		Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026		Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	
		Jml	Pagu (Rp)	Jml	Pagu (Rp)	Jml	Pagu (Rp)
1	Program	316	2.851.620.708.000	316	2.851.620.708.000	316	2.882.543.466.000
2	Kegiatan	881		881		881	
3	Sub Kegiatan	3319		3319		3319	

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, jumlah total Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah konsisten sesuai dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS hingga Raperda Perubahan APBD pada Pemerintah Kabupaten Pemalang. Namun hasil dari pencermatan pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah masih terdapat ketidaksesuaian dan perubahan yang signifikan pada alokasi anggaran di antaranya :

- a. Kecamatan Bodeh
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan belum tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, namun pada Raperda Perubahan APBD dicantumkan dan dianggarkan sebesar Rp23.000.000,00;

- b. Kecamatan Pemalang
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa belum tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, namun pada Raperda Perubahan APBD dicantumkan dan dianggarkan sebesar Rp26.000.000,00;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, tidak dianggarkan, namun dalam Raperda Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp87.856.000,00;
- d. Dinas Komunikasi dan Informatika
Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, semula dianggarkan Rp4.992.318,00 dalam Perubahan RKPD dan dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, menjadi Rp206.989.464,00 dalam Raperda Perubahan APBD atau naik 4046,15%.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

Selanjutnya apabila terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk selanjutnya agar secara terus menerus menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan berpedoman pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Kedepan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

III. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 belum terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diperlukan sehingga akan lebih informatif.
- B. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula Rp2.667.466.672.000,00 berkurang Rp118.552.733.000,00 menjadi Rp2.548.913.939.000,00 atau menurun sebesar 4,44%, secara umum dapat digambarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Pendapat an Daerah (%)
PENDAPATAN DAERAH	2.667.466.672.000	2.548.913.939.000	(118.552.733.000)	
Pendapatan Asli Daerah	547.006.393.000	521.135.680.000	(25.870.713.000)	20,45
Pajak Daerah	248.060.000.000	228.205.000.000	(19.855.000.000)	
Retribusi Daerah	256.258.000.000	253.042.000.000	(3.216.000.000)	

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Pendapatan Daerah (%)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	29.458.393.000	27.625.930.000	(1.832.463.000)	
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.230.000.000	12.262.750.000	(967.250.000)	
Pendapatan Transfer	2.120.460.279.000	2.027.778.259.000	(92.682.020.000)	79,55
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.991.315.415.000	1.872.590.429.000	(118.724.986.000)	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.144.864.000	155.187.830.000	26.042.966.000	
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	0,00
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Dana Darurat	0	0	0	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dianggarkan semula Rp547.006.393.000,00 berkurang Rp25.870.713.000,00 menjadi Rp521.135.680.000,00 atau menurun sebesar 4,73%. Sedangkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar 20,45%. Selanjutnya target PAD tersebut diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
- a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Target pendapatan Pajak Daerah dianggarkan semula Rp248.060.000.000,00 berkurang Rp19.855.000.000,00 menjadi Rp228.205.000.000,00 atau menurun sebesar 8,00% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan pajak pada tabel 3.2 :

Tabel 3.2
Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025 Audited (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)		Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Persentase Selisih (%)
		Anggaran	Realisasi s.d. 30 Juni 2026			
Pajak Daerah	219.656.616.830	248.060.000.000	102.992.039.109	228.205.000.000	(19.855.000.000)	(8,00)
Pajak Hotel	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Pajak Restoran	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Pajak Hiburan	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Pajak Reklame	1.338.363.424	1.850.000.000	805.398.845	1.900.000.000	50.000.000	2,70
Pajak Parkir	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Pajak Air Tanah	1.643.782.155	1.525.000.000	1.004.194.150	1.800.000.000	275.000.000	18,03
Pajak Sarang Burung Walet	6.700.000	5.000.000	600.000	5.000.000	0	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	720.445.600	1.000.000.000	238.102.200	750.000.000	(250.000.000)	(25,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	27.842.442.201	26.600.000.000	7.680.995.098	27.500.000.000	900.000.000	3,38
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	32.923.024.909	31.000.000.000	10.243.400.138	25.000.000.000	(6.000.000.000)	(19,35)
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	62.554.231.041	75.080.000.000	35.681.321.678	74.250.000.000	(830.000.000)	(1,11)
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	57.932.690.500	62.000.000.000	26.407.222.500	55.000.000.000	(7.000.000.000)	(11,29)
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	34.694.937.000	49.000.000.000	20.930.804.500	42.000.000.000	(7.000.000.000)	(14,29)

Selanjutnya, target pendapatan Retribusi Daerah dianggarkan semula Rp256.258.000.000,00 berkurang Rp3.216.000.000,00 menjadi Rp253.042.000.000,00 atau menurun sebesar 1,25% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan retribusi pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025 Audited (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)		Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Persentase Selisih (%)
		Anggaran	Realisasi s.d. 30 Juni 2026			
Retribusi Daerah	247.410.660.694	256.258.000.000	44.449.215.824	253.042.000.000	(3.216.000.000)	(1,25)
Retribusi Jasa Umum	224.531.506.390	226.030.000.000	36.207.321.188	226.030.000.000	0	0,00
Retribusi Jasa Usaha	13.885.138.204	21.788.000.000	5.954.191.912	18.345.000.000	(3.443.000.000)	(15,80)
Retribusi Perizinan Tertentu	8.994.016.100	8.440.000.000	2.287.702.724	8.667.000.000	227.000.000	2,69

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud butir III.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana dimaksud butir III.B.1.a.17) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 serta pada butir III.B.1.a.15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;
- 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana dimaksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;

- 4) pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen), sebagaimana dimaksud pada butir III.B.1.a.15).e).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;
- 5) Target penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 agar disesuaikan dengan mempertimbangkan capaian realisasi Tahun Anggaran 2025 serta perkembangan realisasi penerimaan sampai dengan 30 Juni 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan agar target yang ditetapkan lebih realistis, optimal, dan mampu mencerminkan potensi penerimaan daerah secara lebih akurat.

a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penyediaan anggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan semula Rp29.458.393.000,00 berkurang Rp1.832.463.000,00 menjadi Rp27.625.930.000,00 atau menurun sebesar 6,22% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud butir III.B.1.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dianggarkan semula Rp29.458.393.000,00 berkurang Rp1.832.463.000,00 menjadi Rp27.625.930.000,00 atau menurun sebesar 6,22% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

- b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan semula Rp13.230.000.000,00 berkurang Rp967.250.000,00 menjadi Rp12.262.750.000,00 atau menurun sebesar 7,31% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Persentase Selisih (%)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.230.000.000	12.262.750.000	(967.250.000)	(7,31)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	180.000.000	182.750.000	2.750.000	1,53
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000	1.730.000.000	1.330.000.000	332,50
Hasil Kerja Sama Daerah	0	0	0	0,00
Jasa Giro	1.330.000.000	1.330.000.000	0	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0	0	0	0,00
Pendapatan Bunga	5.000.000.000	2.000.000.000	(3.000.000.000)	(60,00)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	20.000.000	20.000.000	0	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	0	0	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0	0	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	0	0	0,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	0	0	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	6.000.000.000	5.500.000.000	(500.000.000)	(8,33)
Pendapatan BLUD	0	0	0	0,00

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Persentase Selisih (%)
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0	0	0	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0	0	0	0,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0	0	0	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	0	0	0,00
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0	0	0	0,00
Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	300.000.000	1.500.000.000	1.200.000.000	400,00
Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah	0	0	0	0,00

2. Pendapatan Transfer

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp2.120.460.279.000,00 berkurang Rp92.682.020.000,00 menjadi Rp2.027.778.259.000,00 atau menurun sebesar 4,37%. Sedangkan kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar 79,55%. Selanjutnya target Pendapatan Transfer tersebut diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan semula Rp1.991.315.415.000,00 berkurang Rp118.724.986.000,00 menjadi Rp1.872.590.429.000,00 atau turun 5,96%, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a) Dana Desa semula Rp231.768.070.000,00 berkurangRp154.954.728.000,00 menjadi Rp76.813.342.000,00. Alokasi tersebut sesuai dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp76.813.342.000,00 ;
- b) Dana Bagi Hasil (DBH) semula Rp8.039.801.000,00 bertambah Rp19.136.600.000,00 menjadi Rp27.176.401.000,00. Alokasi tersebut sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum

dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 sebesar Rp8.039.801.000,00, ditambah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/475 Tahun 2025 sebesar Rp8.401.907.000,00 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026 sebesar Rp10.734.693.000,00;

- c) Dana Alokasi Umum (DAU) semula Rp1.210.143.304.000,00 bertambah Rp18.481.065.000,00 menjadi Rp1.228.624.369.000,00. Alokasi tersebut sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 sebesar Rp1.210.143.304.000,00 dan ditambah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026 sebesar Rp18.481.065.000,00;
- d) DAK Fisik dialokasikan tetap sebesar Rp29.838.358.000,00. Alokasi tersebut sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025;
- e) DAK Non Fisik semula Rp511.525.882.000,00 berkurang Rp1.387.923.000,00 menjadi Rp510.137.959.000,00. Alokasi tersebut tidak sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 sebesar Rp511.525.882.000,00.

Dalam hal terdapat selisih penganggaran Dana TKD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar melakukan penyesuaian atas besaran alokasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dalam hal penganggaran penggunaan Dana TKD yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp129.144.864.000,00 bertambah Rp26.042.966.000,00 menjadi Rp155.187.830.000,00 atau meningkat 20,17%, yang diuraikan ke dalam rincian objek :

- a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak semula Rp129.144.864.000,00 bertambah Rp21.908.966.000,00 menjadi Rp151.053.830.000,00;
- b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi semula Rp 0,00 bertambah Rp4.134.000.000,00 menjadi Rp4.134.000.000,00;

Pemerintah Kabupaten Pemalang agar melakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait poin a) dan b) yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

IV. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 disampaikan sebagai berikut:

A. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, telah disertai penjelasan mengenai lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati Pemalang dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir III.A.5 dan IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

B. Alokasi Belanja Daerah
Penyediaan anggaran Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula Rp2.944.643.010.000,00 berkurang Rp62.099.544.000,00 menjadi Rp2.882.543.466.000,00 atau turun sebesar 2,11%, secara umum dapat digambarkan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Alokasi Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
BELANJA DAERAH	2.944.643.010.000	2.882.543.466.000	(62.099.544.000)	
Belanja Operasi	2.156.102.924.045	2.167.497.961.015	11.395.036.970	75,19
Belanja Pegawai	1.309.892.354.543	1.300.883.673.113	(9.008.681.430)	
Belanja Barang dan Jasa	779.792.397.310	806.561.722.491	26.769.325.181	
Belanja Bunga	5.135.880.000	4.720.388.889	(415.491.111)	
Belanja Subsidi	100.000.000	100.000.000	0	
Belanja Hibah	58.150.792.192	54.118.676.522	(4.032.115.670)	
Belanja Bantuan Sosial	3.031.500.000	1.113.500.000	(1.918.000.000)	
Belanja Modal	339.312.169.155	390.940.974.185	51.628.805.030	13,56
Belanja Modal Tanah	17.600.000.000	26.039.095.937	8.439.095.937	

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Alokasi Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.313.817.321	71.652.964.664	15.339.147.343	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.898.492.368	69.228.191.437	15.329.699.069	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	206.014.537.916	202.295.536.599	(3.719.001.317)	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.471.221.550	21.711.085.548	16.239.863.998	
Belanja Modal Aset Lainnya	14.100.000	14.100.000	0	
Belanja Tidak Terduga	4.941.715.745	13.209.357.745	8.267.642.000	0,46
Belanja Tidak Terduga	4.941.715.745	13.209.357.745	8.267.642.000	
BELANJA TRANSFER	444.286.201.055	310.895.173.055	(133.391.028.000)	10,79
Belanja Bagi Hasil	26.846.340.500	26.846.340.500	0	
Belanja Bantuan Keuangan	417.439.860.555	284.048.832.555	(133.391.028.000)	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai dianggarkan semula Rp1.309.892.354.543,00 berkurang Rp9.008.681.430,00 menjadi Rp1.300.883.673.113,00 atau menurun 0,69%. Alokasi Belanja Pegawai sebesar 45,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang antara lain tercantum pada :

a. Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp822.779.446.791,00 berkurang Rp9.854.406.530,00 menjadi Rp812.925.040.261,00 menurun sebesar 1,20%, anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2026, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2026.

b. Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

- 1) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) diuraikan sebagai berikut:
 - a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp39.562.702.000,00 bertambah Rp2.359.637.000,00 menjadi Rp41.922.339.000,00 meningkat sebesar 5,96%;
 - b) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan tetap sebesar 120.000.000,00 dan
 - c) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dianggarkan tetap sebesar 6.500.000,00,dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan dalam melakukan perhitungan kebutuhan penyelenggaraan kesehatan dimaksud berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta butir III.C.1.a.1).d) dan butir III.C.1.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Penyediaan anggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, diuraikan sebagai berikut:
 - a) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi ASN, yang tercantum pada:
 - (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.343.622.000,00 berkurang Rp75.372.000,00 menjadi Rp1.268.250.000,00 turun sebesar 5,61%; dan
 - (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp3.939.995.000,00 berkurang Rp136.365.000,00 menjadi Rp3.803.630.000,00 turun sebesar 3,46%.
 - b) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang tercantum pada:

- (1) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja bagi DPRD dianggarkan tetap sebesar Rp3.600.000,00; dan
 - (2) Belanja Jaminan Kematian bagi DPRD dianggarkan tetap sebesar Rp8.400.000,00.
- c) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi KDH/WKDH yang tercantum pada:
- (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH dianggarkan tetap sebesar Rp446.500,00; dan
 - (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH dianggarkan tetap sebesar Rp1.339.500,00.

Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam melakukan perhitungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir III.C.1.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

c. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp445.780.109.108,00 bertambah Rp5.114.299.471,00 menjadi Rp450.894.408.579,00 atau meningkat sebesar 1,15%. Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir III.C.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar melakukan pencermatan

kembali berkenaan permohonan persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2026 kepada Menteri Dalam Negeri, apabila didalamnya terdapat kenaikan indeks besaran Tambahan Penghasilan ASN.

Berkaitan dengan *Mandatory Spending* Belanja Pegawai yaitu Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD yang diuraikan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Mandatory Spending Belanja Pegawai

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.300.883.673.113
2	Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (Faktor Pengurang)	
3	Total Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (1-2)	1.300.883.673.113
4	Total Anggaran Belanja Daerah	2.882.543.466.000
5	Persentase (3:4)	45,13%

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, Pemerintah Kabupaten Pemalang masih belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pemalang memastikan :

1. Target Pendapatan DAK Non Fisik terutama untuk Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru telah sesuai dengan alokasi pada Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025.
2. Penggunaan rekening pendapatan untuk Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru dari DAK Non Fisik menggunakan rekening :
 - DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru;
 - DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru;
 - DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru.
3. Menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD, berdasarkan amanat butir III.C.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan semula Rp779.792.397.310,00

bertambah Rp26.769.325.181,00 menjadi Rp806.561.722.491,00 atau 27,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2026. Alokasi belanja barang dan jasa dimaksud harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajiban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

3. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp58.150.792.192,00 berkurang Rp4.032.115.670,00 menjadi Rp54.118.676.522,00 atau 1,88% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, yang dianggarkan semula Rp26.965.176.192,00 berkurang Rp 4.032.115.670,00 menjadi Rp 22.933.060.522,00 atau turun sebesar 14,95%;
- b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp3.031.500.000,00 berkurang Rp1.918.000.000,00 menjadi Rp1.113.500.000,00 atau 0,04% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana dimaksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.C.1.b.9) dan butir III.C.1.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;

- c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil.

4. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal dianggarkan semula Rp339.312.169.155,00 bertambah Rp51.628.805.030,00 menjadi Rp390.940.974.185,00 atau meningkat sebesar 15,22%. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut berkontribusi sebesar 13,56% dari total belanja. Untuk itu kami mengapresiasi, dan mendorong Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya untuk konsisten dalam menambah alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dianggarkan semula Rp56.313.817.321,00 bertambah Rp15.339.147.343,00 menjadi Rp71.652.964.664,00 atau meningkat sebesar 27,24%;
- b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dianggarkan semula Rp53.898.492.368,00 bertambah Rp15.329.699.069,00 menjadi Rp69.228.191.437,00 atau meningkat sebesar 28,44%;
- c) Belanja Modal Tanah, dianggarkan semula Rp 17.600.000.000,00 bertambah Rp8.439.095.937,00 menjadi Rp26.039.095.937,00 atau meningkat sebesar 47,95%;
- d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dianggarkan semula Rp5.471.221.550,00 bertambah Rp16.239.863.998,00 menjadi Rp21.711.085.548,00 atau meningkat sebesar 296,82%.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

5. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp4.941.715.745,00 bertambah Rp8.267.642.000,00 menjadi Rp13.209.357.745,00 atau meningkat 167,30%. Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir III.C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi

permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

1. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
2. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir III.C.3.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

C. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan, dianggarkan semula sebesar Rp27.530.933.600,00 berkurang Rp(599.766.729,00) menjadi sebesar Rp26.931.166.871,00 atau sebesar 11,51% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan di luar belanja pegawai pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp233.990.271.450,00.

2. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan, dianggarkan semula sebesar Rp13.293.114.000,00 berkurang Rp118.126.400,00 menjadi sebesar Rp13.174.987.600,00 atau 3,11% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di luar belanja pegawai sebesar Rp424.257.092.611,00.

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dianggarkan semula sebesar Rp1.832.475.000,00 bertambah Rp1.550.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.382.475.000,00 atau 1,32% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di luar belanja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp255.826.427.779,00.

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dianggarkan semula sebesar Rp215.217.000,00

bertambah Rp23.580.000,00 menjadi sebesar Rp238.797.000,00 atau 3,86% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di luar belanja pegawai pada Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.192.333.100,00.

5. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dianggarkan semula sebesar Rp1.308.178.000,00 bertambah Rp588.222.000,00 menjadi sebesar Rp1.896.400.000,00 atau 15,47% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di luar belanja pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp12.259.200.000,00.

6. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial, dianggarkan semula sebesar Rp545.778.800,00 bertambah Rp56.880.000,00 menjadi sebesar Rp602.658.800,00 atau 10,64% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial di luar belanja pegawai pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp5.665.307.400,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada urusan pemerintahan pelayanan dasar, serta memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

D. Alokasi Anggaran Pendidikan

Penyediaan anggaran Belanja Pendidikan untuk *Mandatory Spending* Belanja Pendidikan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula sebesar Rp1.142.167.676.343,00 bertambah Rp5.412.814.949,00 menjadi sebesar Rp1.147.580.491.292,00 atau 39,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, telah memenuhi alokasi anggaran untuk belanja pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Pemalang dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan butir V.A.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

E. Alokasi Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Pemalang berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik semula sebesar Rp740.321.618.479,00 bertambah Rp44.420.736.557,00 menjadi sebesar Rp784.742.355.036,00 atau 28,67% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Sesuai ketentuan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang belum memenuhi alokasi Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang APBD Tahun 2026 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta butir V.A.2.a dan butir V.A.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

F. Alokasi Anggaran Pengawasan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji dan Tunjangan serta TPP ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula sebesar Rp6.411.495.200,00 berkurang Rp309.878.000,00 menjadi sebesar Rp6.101.617.200,00 atau 0,21% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir V.C.35.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan dengan total belanja diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Pemalang belum memenuhi ketentuan tersebut.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Pemalang agar mempertimbangkan penyediaan anggaran untuk kegiatan pengawasan dengan memperhatikan kebutuhan riil dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya:

1. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;

2. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:

- 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
- 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektor, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
- 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
- 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Reviu* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir V.C.35.a, butir V.C.35.b dan butir V.C.35.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

G. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN dianggarkan semula sebesar Rp695.098.000,00 bertambah Rp252.348.391,00 menjadi sebesar Rp947.446.391,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sesuai ketentuan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang belum memenuhi alokasi Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN.

Diharapkan Pemerintah Kabupaten Pemalang agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

H. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik

Alokasi anggaran untuk belanja penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum bersumber dari Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dianggarkan semula sebesar

Rp15.296.517.000,00 bertambah Rp4.169.709.500,00 menjadi sebesar Rp19.466.226.500,00 atau 29,72% dari total Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebesar Rp65.500.000.000,00 . Pemerintah Kabupaten Pemalang telah memenuhi alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik tersebut.

Penggunaan Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik agar dipertahankan atau ditingkatkan (paling sedikit 10%) untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

I. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Opsen PKB

Alokasi anggaran untuk belanja pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang bersumber dari penerimaan Opsen PKB, dianggarkan semula sebesar Rp6.319.064.000,00 bertambah Rp5.490.000,00 menjadi sebesar Rp6.324.554.000,00 atau 11,50% dari total Hasil Penerimaan Opsen PKB sebesar Rp55.000.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah memenuhi alokasi anggaran pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang bersumber dari Opsen PKB.

Penggunaan Opsen PKB agar dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

J. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok

Alokasi anggaran untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok, dianggarkan semula sebesar Rp32.000.000.000,00 bertambah Rp10.346.017.300,00 menjadi sebesar Rp42.346.017.300,00 atau 54,10% dari total Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp78.273.470.000,00, di antaranya untuk pendanaan program JKN yang dianggarkan semula Rp31.999.968.000,00 bertambah Rp7.516.756.800,00 menjadi sebesar Rp39.516.724.800,00 atau 50,49% dari total Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp78.273.470.000,00. Alokasi tersebut memenuhi alokasi anggaran atas pendanaan program JKN.

Pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari Pajak Rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Dalam rangka mendukung program JKN, Pemerintah Kabupaten Pemalang menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian Kabupaten/Kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan Pajak Rokok bagian hak Kabupaten/Kota atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir III.B.1.a.3) dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

K. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT)

Alokasi anggaran untuk belanja pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah bersumber dari Penerimaan PAT, dianggarkan semula sebesar Rp 0,00 bertambah Rp235.590.000,00 menjadi sebesar Rp235.590.000,00 atau 13,09% dari total Hasil Penerimaan PAT sebesar Rp1.800.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah memenuhi alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan PAT tersebut.

Penggunaan Hasil Penerimaan PAT agar dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

L. Alokasi Dana Sinergitas

Pemerintah Kabupaten Pemalang agar melakukan penyesuaian dan optimalisasi penganggaran dana sinergitas Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2026 sesuai dengan persentase yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), yaitu sebesar 1,5% dari target Opsen. Berdasarkan alokasi Tahun 2026, dari target Opsen sebesar Rp111.000.000.000,00, alokasi yang seharusnya sebesar Rp1.665.000.000,00, namun baru dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00 atau 1,17%, sehingga masih terdapat kekurangan alokasi sebesar Rp365.000.000,00. Adapun pemanfaatan dana sinergitas mempedomani PKS Nomor 100.3.7.1/129/2024 dan 100.3.7.1/05/PKS/TAPEM/2024 yang telah ditandatangani oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah dan Sekda Kabupaten Pemalang. Antara lain digunakan untuk: Penanganan Piutang PKB, Edukasi dan Sosialisasi serta

Penyediaan sarana prasarana dan mobilitas operasional untuk mendukung layanan.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Pemalang wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) sinergitas optimalisasi Opsen Pajak bersama Kepala UPPD Pemalang dan melaporkannya kepada Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah. RKT memuat target, kegiatan, jadwal, kebutuhan anggaran, dan indikator capaian sinergitas optimalisasi pendapatan daerah.

M. Pembayaran Pajak Plat Merah

Pemerintah Kabupaten Pemalang agar segera memperkuat sinergi dengan UPPD Pemalang dan melakukan percepatan penyelesaian seluruh piutang pajak. Khusus kendaraan dinas/plat merah, Pemerintah Kabupaten Pemalang wajib memastikan seluruh kendaraan terdata dan memiliki kecukupan anggaran pembayaran PKB, sehingga tidak terdapat tunggakan pajak kendaraan milik pemerintah daerah.

N. Anggaran Jaminan Sosial kepada Masyarakat

Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Pemalang, diantaranya pada rekening:

1. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula sebesar Rp48.225.958.200,00 bertambah Rp9.945.369.000,00 menjadi sebesar Rp58.171.327.200,00 atau meningkat sebesar 20,62%; dan
2. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dianggarkan semula sebesar Rp3.024.000.000,00 bertambah Rp29.722.000,00 menjadi sebesar Rp3.053.722.000,00 atau meningkat sebesar 0,98%.

sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(7).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 bahwa dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,7% dari total penduduk pada tahun 2026 dan cakupan peserta aktif Program JKN mencapai minimal 80% terhadap penduduk sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar menganggarkan iuran baik sebagian maupun seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI serta menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

O. Alokasi Tematik Pangan

Dalam rangka mendukung tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yaitu “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”, Pengalokasian APBD Pemerintah Kabupaten Pemalang diprioritaskan pada penguatan ketahanan pangan. Sinkronisasi nomenklatur program daerah dengan indikator program delegasi gubernur harus diselesaikan sejak dini agar tidak menimbulkan sumbatan administratif saat evaluasi akhir di tingkat provinsi.

P. Alokasi 35 program delegasi Gubernur kepada Kabupaten/Kota

Melalui program delegasi diharapkan anggaran Kabupaten Pemalang fokus dan mendukung penuntasan isu-isu mendasar Provinsi Jawa Tengah secara makro, seperti percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pemerataan infrastruktur, hingga ketahanan pangan sebagai tema pembangunan Jawa Tengah 2026 yaitu “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”.

Pemerintah Kabupaten Pemalang tetap mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan/kegiatan bersifat riil pada perangkat daerah sebagai bentuk dukungan yang mencakup dalam 35 Program Delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam penyusunan APBD.

Q. Kecamatan Berdaya

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

R. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar:

1. melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan SKPD terkait;
3. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan BPD bersama unsur Masyarakat dengan melibatkan SKPD terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa;
4. menganggarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
6. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2026.

S. Pemerintah Kabupaten Pemalang agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:

1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
2. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
3. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

T. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan

mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026.

V. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyediaan anggaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 secara umum dapat digambarkan pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)
PEMBIAYAAN DAERAH			
Penerimaan Pembiayaan	292.176.338.000	343.629.527.000	51.453.189.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	92.176.338.000	143.629.527.000	51.453.189.000
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	200.000.000.000	200.000.000.000	-
Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000	10.000.000.000	(5.000.000.000)
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	10.000.000.000	(5.000.000.000)

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-
Pembentukan Dana Abadi Daerah	-	-	-
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	-	-	-
Pembiayaan Netto	277.176.338.000	333.629.527.000	56.453.189.000

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp92.176.338.000,00 bertambahRp51.453.189.000,00 menjadi Rp143.629.527.000,00 atau meningkat sebesar 55,82%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Selanjutnya berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025, bahwa SILPA Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya menjadi potensi penerimaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp143.629.527.665,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pemalang agar melakukan penyesuaian kembali potensi penerimaan SiLPA pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan SILPA Tahun 2025 pada Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan tetap sebesar Rp 0,00 . Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disarankan untuk menganggarkan Pembentukan Dana Cadangan sebagai upaya penyediaan pendanaan bagi pelaksanaan program dan/atau kegiatan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, khususnya untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029.

Dalam pembentukan Dana Cadangan tersebut, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, dalam rangka memperoleh informasi dan memastikan besaran kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029.

VI. LAIN-LAIN

A. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Konsideran Menimbang huruf b dan huruf c agar disempurnakan sebagai berikut:
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2026, maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2026;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
2. Dasar Hukum “Mengingat” angka 5 agar dihapus.
3. Pasal 1 agar ditambahkan definisi Batasan pengertian sebagai berikut:
 - a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
 - c. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 - d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
 - e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

B. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Dasar Hukum “Mengingat” angka 4 agar dihapus.
2. Pasal 1 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

17. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Tahun Anggaran 2026 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

3. Pasal 4 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ketentuan mengenai pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- C. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
- D. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026.
- E. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- F. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.
- G. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- H. Selanjutnya, agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, baik dari aspek teknik penyusunan maupun substansi materi muatan, sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas.
- I. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pemalang.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001